

Katalog/Catalog: 9102067.35



Potensi

# USAHA MIKRO KECIL



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**



Potensi

# USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI JAWA TIMUR



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL  
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: 978-602-6756-94-7  
No. Publikasi: 35000.1814  
No. Katalog: 9102067.35

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm  
Jumlah Halaman: vi + 34 halaman

Naskah: Bidang Neraca

Penyunting: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik

Tata Letak: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Sumber Ilustrasi: [www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://jatim.bps.go.id>

# Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

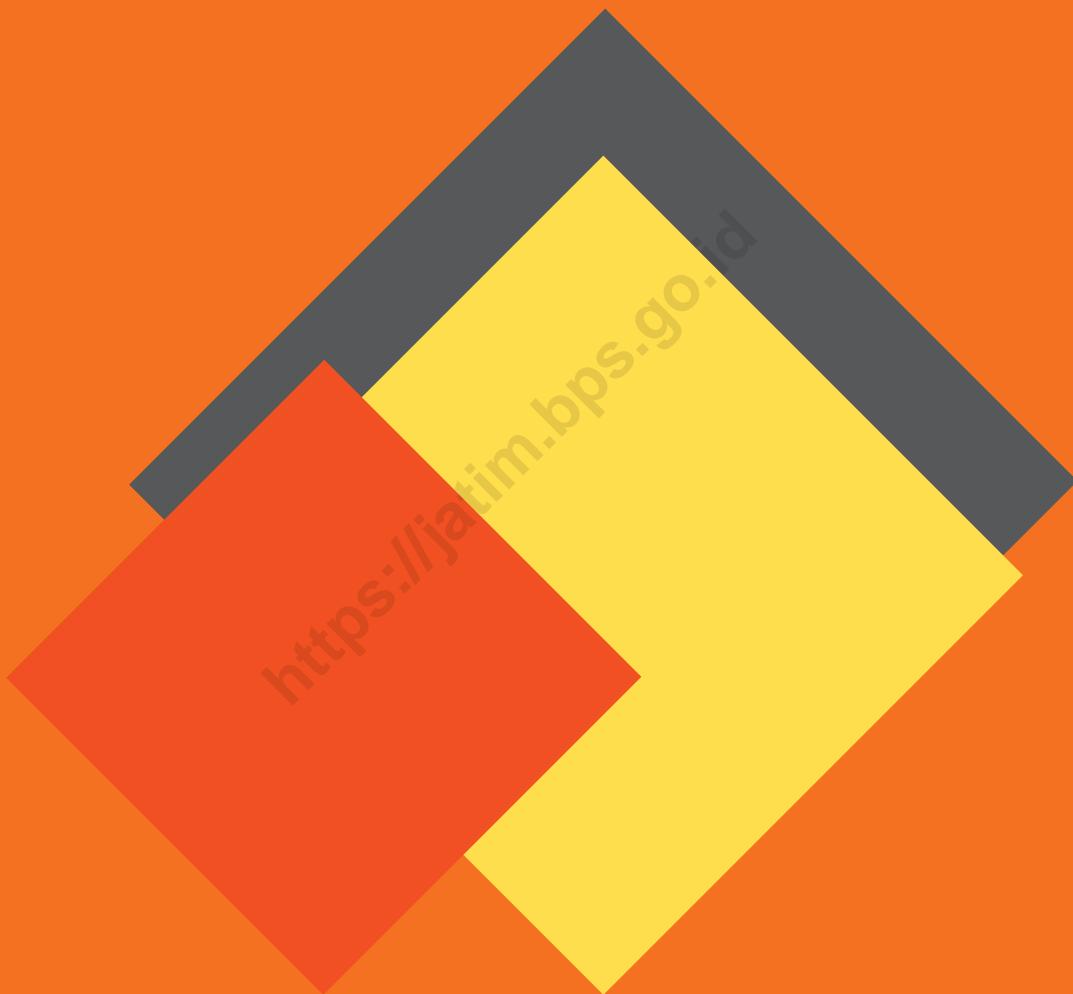
Surabaya, September 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Timur

Teguh Pramono



# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI JAWA TIMUR	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN	17
AKSEBILITAS PERMODALAN UMK	21
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	25
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG	31



<https://jatim.bps.go.id>

# Pendahuluan

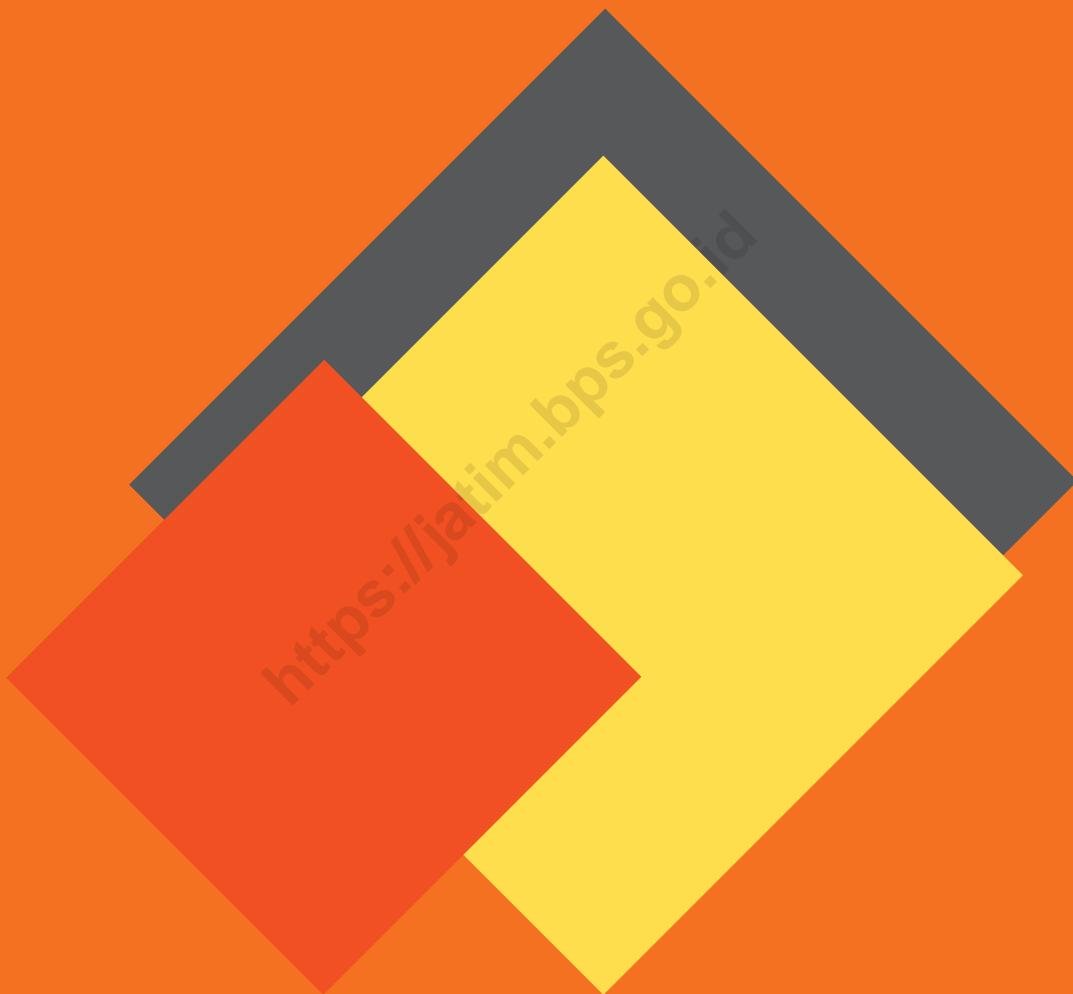
Dunia usaha di Provinsi Jawa Timur pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai 4,57 juta usaha atau 98,95 persen dari total usaha/perusahaan nonpertanian di Jawa Timur. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 10,91 juta orang atau sekitar 79,82 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuhan.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Timur, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



---

**UMK**  
**MENDOMINASI**  
**JUMLAH**  
**USAHA DI**  
**JAWA TIMUR**

---

Bagian

1

<https://jatim.bps.go.id>

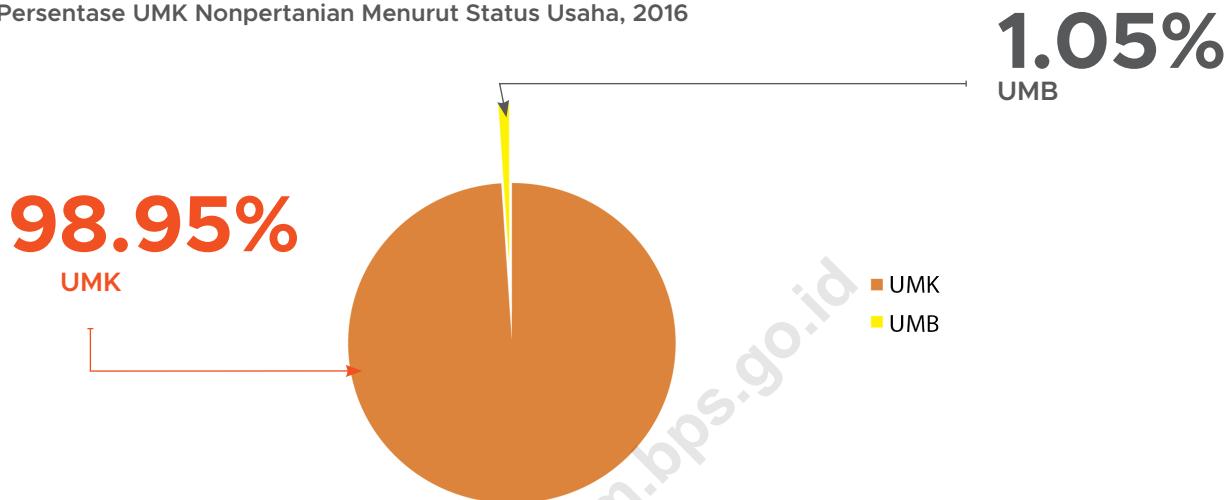
**U**MK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Timur. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Provinsi Jawa Timur mencapai 98,95 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 2,04 juta usaha atau mencapai 44,70 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing berkontribusi lebih dari 17 persen, yaitu 17,90 persen dan 18,53 persen.

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Surabaya menjadi pusat pergerakan ekonomi di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota, jumlah UMK di Kota Surabaya mencapai 7,90 persen. Pada posisi kedua dan ketiga, Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang merupakan dua wilayah dengan jumlah UMK lebih dari 5 persen di Jawa Timur, berturut-turut 6,13 persen dan 5,61 persen.

**UMK  
MENDOMINASI  
JUMLAH  
USAHA DI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Gambar 1.1.**  
**Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Gambar 1.2.**  
**Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017**

Pulau	Jumlah	Persentase (%)	Pulau	Jumlah	Persentase (%)
[01] Pacitan	77.347	1,69	[71] Kota Kediri	38.332	0,84
[02] Ponorogo	97.661	2,14	[72] Kota Blitar	22.090	0,48
[03] Trenggalek	93.834	2,05	[73] Kota Malang	108.350	2,37
[04] Tulungagung	132.865	2,91	[74] Kota Probolinggo	32.622	0,71
[05] Blitar	140.863	3,08	[75] Kota Pasuruan	31.006	0,68
[06] Kediri	174.382	3,82	[76] Kota Mojokerto	16.501	0,36
[07] Malang	256.571	5,61	[77] Kota Madiun	32.418	0,71
[08] Lumajang	117.437	2,57	[78] Kota Surabaya	361.079	7,90
[09] Jember	279.912	6,13	[79] Kota Batu	27.605	0,60
[10] Banyuwangi	240.143	5,25	[XX] Jawa Timur	4.569.822	100,00
[11] Bondowoso	106.807	2,34			
[12] Situbondo	93.173	2,04			
[13] Probolinggo	123.837	2,71			
[14] Pasuruan	178.042	3,90			
[15] Sidoarjo	200.254	4,38			
[16] Mojokerto	122.572	2,68			
[17] Jombang	158.185	3,46			
[18] Nganjuk	117.235	2,57			
[19] Madiun	72.953	1,60			
[20] Magetan	82.483	1,80			
[21] Ngawi	82.615	1,81			
[22] Bojonegoro	123.789	2,71			
[23] Tuban	114.156	2,50			
[24] Lamongan	129.375	2,83			
[25] Gresik	128.438	2,81			
[26] Bangkalan	105.889	2,32			
[27] Sampang	81.499	1,78			
[28] Pamekasan	108.389	2,37			
[29] Sumenep	159.113	3,48			

---

**UMK  
SEBAGAI  
PENYERAP  
TENAGA KERJA  
TERBANYAK**

---

Bagian

**2**

<https://jatim.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Jawa Timur tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode Agustus 2017 mencapai 4 persen, terbanyak pada lulusan SMK yang mencapai lebih dari 9 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran, salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan Diploma dan SMA masing-masing 7,5 persen dan 6,8 persen.

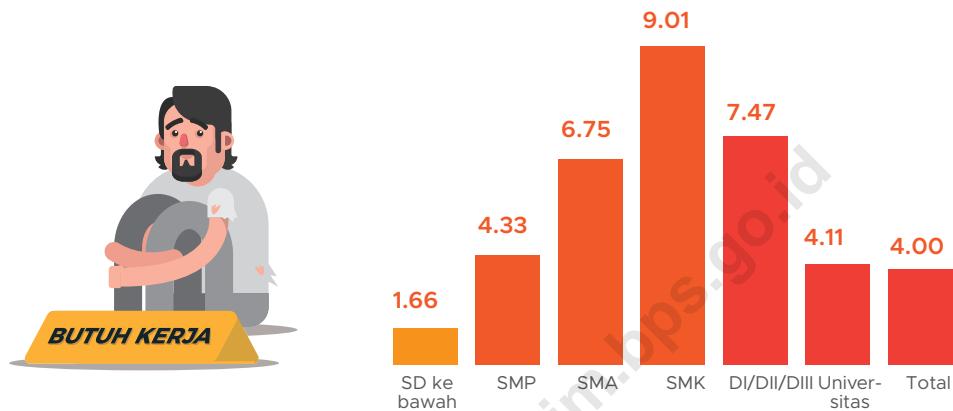
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja, khususnya pada tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMK) akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016 memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap 10,91 juta tenaga kerja. Dengan jumlah usaha yang mendominasi, usaha mikro juga mendominasi dari sisi penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling

banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) lebih dari 3,83 juta jiwa atau mencapai lebih dari 35,12 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Industri Pengolahan (kategori C) dan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK, masing-masing sebesar 2,68 juta jiwa dan 1,51 juta jiwa. Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Konstruksi (kategori F) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja per usaha/perusahaan. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Jawa Timur hanya sebesar 2 pekerja.

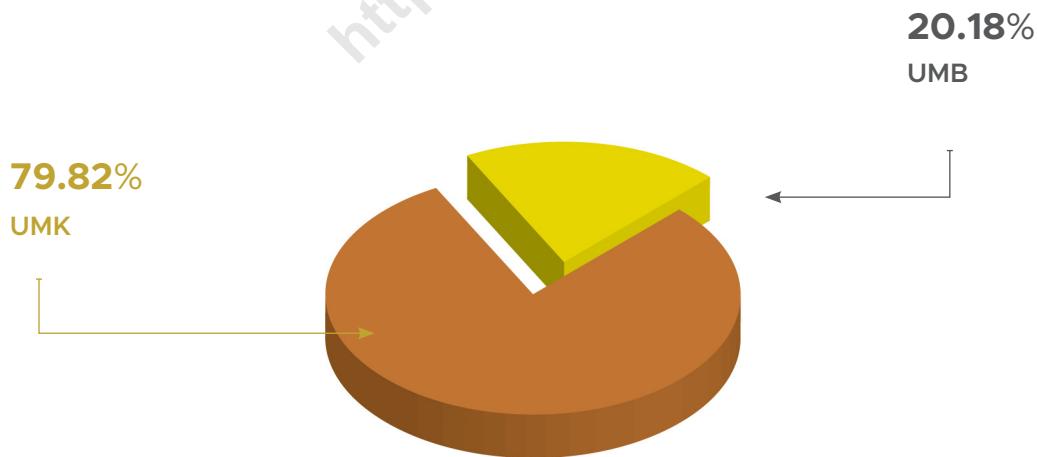
**UMK  
SEBAGAI  
PENYERAP  
TENAGA  
KERJA  
TERBANYAK**

Gambar 2.1.  
Tingkat Pengangguran di Jawa Timur menurut Pendidikan, 2017



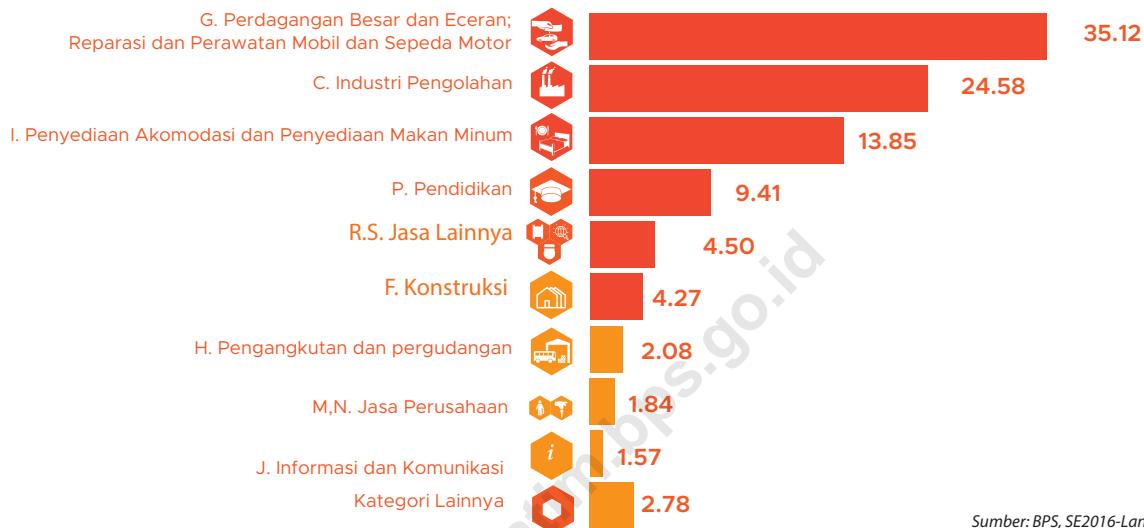
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.2.  
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Gambar 2.3.**  
**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Tabel 2.**  
**Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2017**

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	48.447	96.197	2
C. Industri Pengolahan	847.007	2.680.392	3
F. Konstruksi	39726	465.452	12
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.042.628	3.830.249	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	161.150	226.617	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	818.058	1.511.032	2
J. Informasi dan Komunikasi	111.257	170.830	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	15.997	80.137	5
L. Real Estat	18.114	24.570	1
M,N. Jasa Perusahaan	64.141	201.159	3
P. Pendidikan	111.553	1.026.449	9
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	35.596	102.259	3
R,S. Jasa Lainnya	256.148	490.810	2
Total	4.569.822	10.906.153	2

---

**PENGELOLAAN  
UMK  
DILAKUKAN  
SECARA  
SEDERHANA**

---

Bagian

**3**

<https://jatim.bps.go.id>

## PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

**P**enyerapan tenaga kerja yang besar UMK di Jawa Timur memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

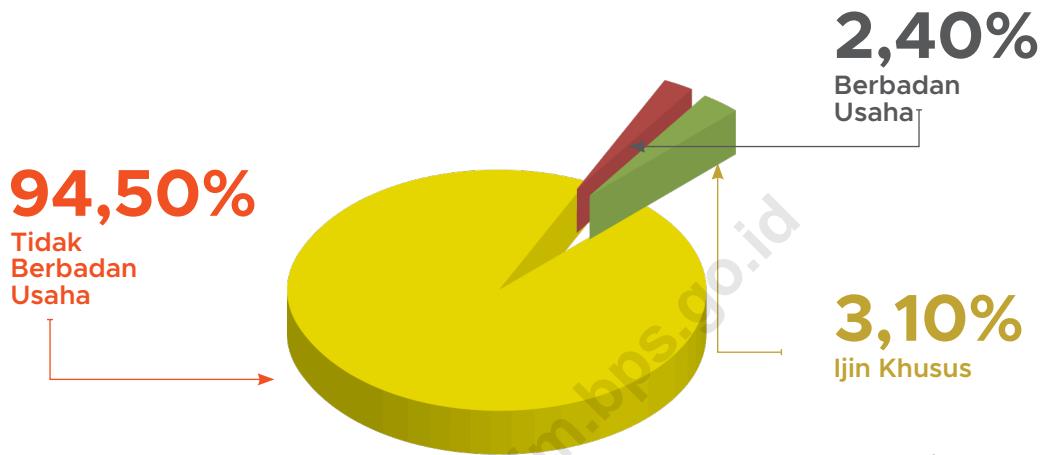
Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 94,50 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer. Komputer tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran produk dan

lain-lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk UMK. Namun demikian, hanya 6,42 persen UMK yang menggunakan komputer, dan dari total UMK yang menggunakan komputer sebanyak 11,00 persen menggunakan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya 6,77 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

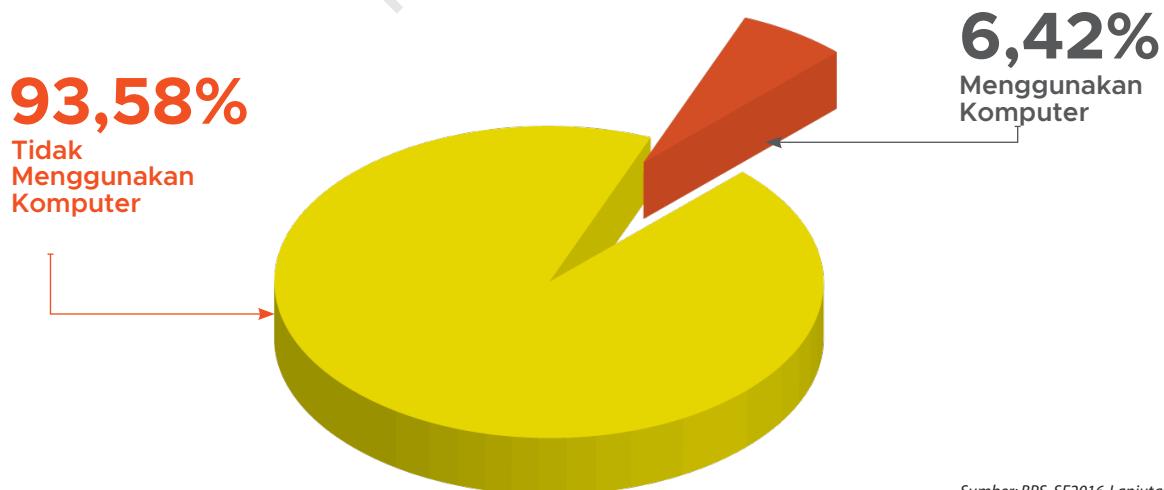
Di antara sektor Nonpertanian, UMK pada kategori Pendidikan yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan hukum, adanya laporan keuangan, dan penggunaan komputer. UMK Pendidikan relatif mempunyai persentase tertinggi di antara kategori lainnya. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin paling banyak persentase UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lainnya.

Gambar 3.1.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



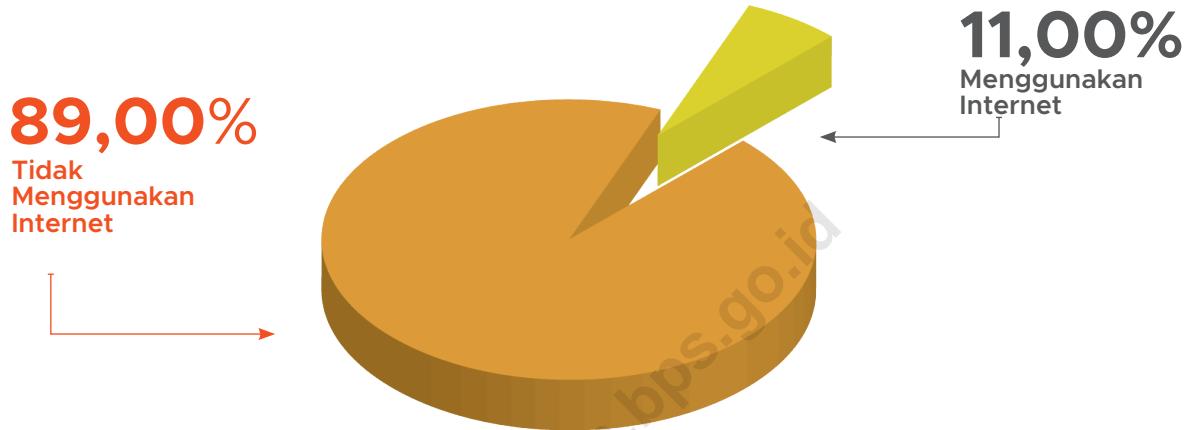
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016



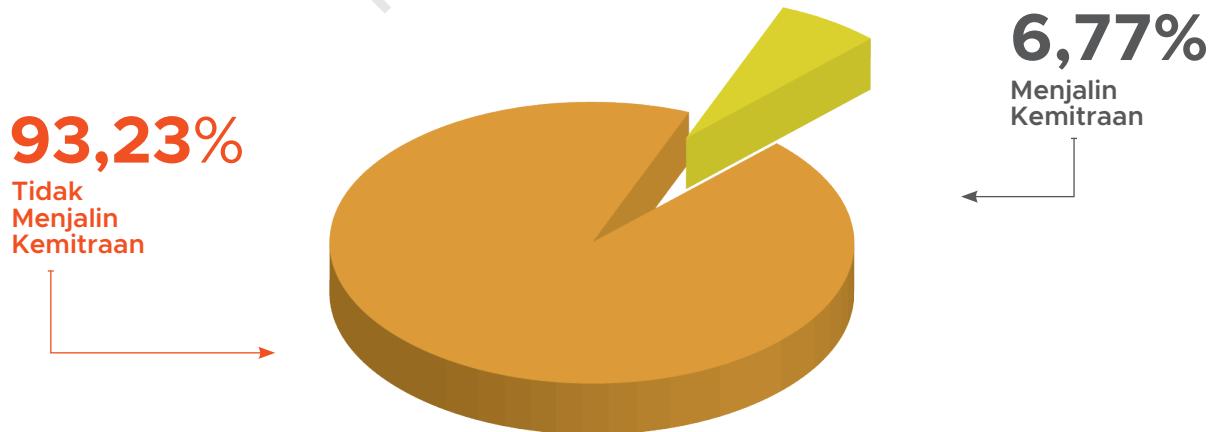
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Penyusunan Laporan Keuangan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Tabel 3.**  
**Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan, Menggunakan Komputer, dan Menjalिन Kemitraan, 2016**

Kategori	Berbadan Hukum	Mempunyai Laporan Keuangan	Menggunakan Komputer	Menjalिन Kemitraan
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	3,22	6,38	11,88	6,90
C. Industri Pengolahan	3,59	3,34	7,89	8,91
F. Konstruksi	38,70	35,68	37,89	19,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,08	3,62	8,33	6,83
H. Pengangkutan dan Pergudangan	2,97	2,18	6,96	4,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,46	1,69	6,06	2,61
J. Informasi dan Komunikasi	2,19	26,37	42,66	10,84
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70,91	53,55	32,16	15,00
L. Real Estat	2,11	3,14	6,52	1,42
M,N. Jasa Perusahaan	10,63	30,19	32,19	13,07
P. Pendidikan	70,10	63,46	56,60	13,09
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	50,49	24,42	31,70	15,15
R,S. Jasa Lainnya	2,73	7,48	14,44	11,61
Total	5,50	6,42	11,00	6,77





---

**PELAKU  
UMK  
MAYORITAS  
PERORANGAN**

---

Bagian

**4**

<https://jatim.bps.go.id>

**S**alah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yaitu pelaku usaha yang merupakan tenaga kerja. Sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Untuk meningkatkan pendapatan UMK, pengelola harus mempunyai bekal dan pengetahuan mengenai bisnis usaha. Hasil data SE2016 menunjukkan 46,07 persen UMK dilakukan secara perorangan (tanda dibantu tenaga kerja, termasuk tenaga kerja tidak dibayar/tenaga kerja keluarga).

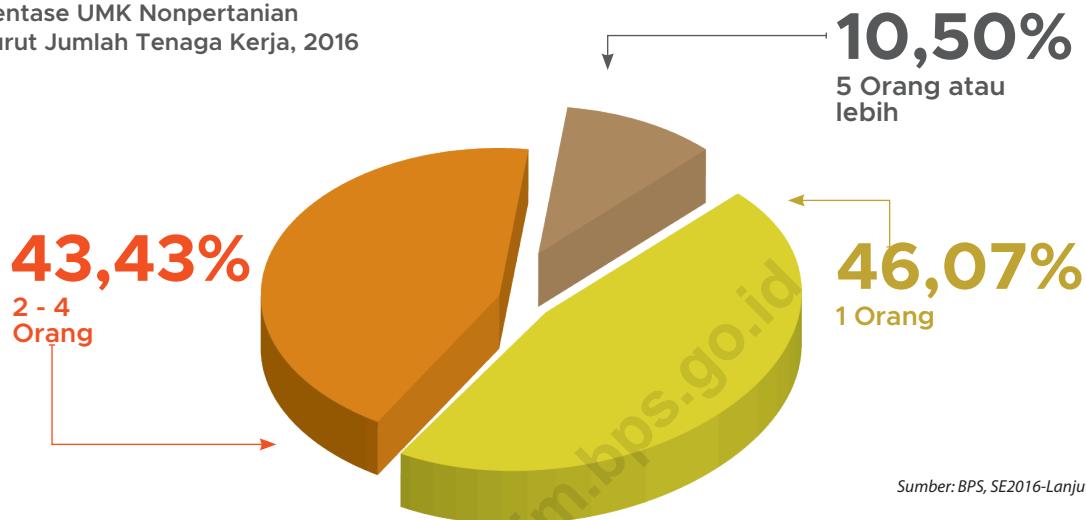
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan 45,85 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya norma jika laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Berpijak dengan hal tersebut dapat

diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Lebih dari sepertiga pengelola berpendidikan SD kebawah, paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SMP dan SMA juga cukup besar. Dari kenyataan, masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti program pelatihan-pelatihan.

**PELAKU  
UMK  
MAYORITAS  
PERORANGAN**

Gambar 4.1.  
Persentase UMK Nonpertanian  
Menurut Jumlah Tenaga Kerja, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.  
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.  
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

---

# AKSEBILITAS PERMODALAN UMK

---

Bagian

5

<https://jatim.bps.go.id>

**P**ermodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Seperti diketahui bahwa jumlah UMK mendominasi jumlah usaha di Jawa Timur. Dengan kapasitas usaha yang relatif kecil, permodalan usaha ini masih banyak menggunakan modal sendiri. Alasan UMK tidak menjadikan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai sumber pemberi modal/usaha utamanya adalah karena alasan bunga tinggi, tidak tahu prosedur dan tidak memiliki agunan.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Oleh sebab itu, lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun demikian, karakteristik usaha tetap menjadi pertimbangan.

UMK yang memiliki badan hukum memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan usaha dari lembaga keuangan dibandingkan usaha perorangan. Pihak kreditor biasanya mengidentifikasi profil perusahaan termasuk badan hukum dan identitas lainnya yang mendukung termasuk kepemilikan

sertifikasi usaha. Profil usaha yang legal (memiliki ijin usaha) tentunya akan mendapatkan prioritas.

Berdasarkan hasil SE2016-Lanjutan, ternyata akses permodalan bagi UMK masih menjadi barang langka. Hanya 11,97 persen UMK yang pernah melakukan kredit. Masih jauh yang diharapkan oleh Pemerintah dalam target program KUR-nya. Berbagai alasan yang menyebabkan UMK tidak mengambil kredit. Sebanyak 18,33 persen mengaku suku bunga kredit cukup tinggi yang membebani usaha. Namun yang perlu menjadi perhatian, terdapat 12,73 persen yang mengaku tidak tahu prosedur mendapatkan kredit. Bisa jadi, dari sejumlah itu ada UMK yang betul-betul menginginkan kredit untuk memajukan usahanya. Oleh karena itu, sosialisai kredit oleh Perbankan hingga ke pelosok menjadi suatu hal yang sangat penting.

Gambar 5.1.  
 Persentase UMK Menurut Akses terhadap Permodalan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.  
 Persentase UMK yang Tidak Mempunyai Akses ke Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Menurut Alasannya (persen), 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Gambar 5.3.**  
**Faktor yang Mempengaruhi Akses Kredit Perbankan**



---

**KINERJA  
USAHA  
DARI SISI  
KEUANGAN**

---

Bagian

**6**

<https://jatim.bps.go.id>

**K**inerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif. Sebanyak 30,18 persen mengaku meningkat dan 40,85 persen mengaku menghasilkan laba yang tetap. UMK yang mengaku labanya menurun hanya 22,27 persen. Rasio pengeluaran terhadap pendapatan terbesar tercatat pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) sebesar 0,85.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laba UMK digunakan analisis determinan model regresi berganda menggunakan program SPSS. Hasilnya, variabel sertifikasi, asosiasi, kredit dan online memberikan pengaruh secara signifikan terhadap laba usaha.

Terkait UMK di Jawa Timur, UMK yang mengikuti asosiasi akan memperoleh pangsa pasar yang luas, daya saing juga bisa diperhitungkan dan dapat memperoleh informasi penting tentang

pengembangan usaha. Sehingga UMK yang mengikuti asosiasi mempunyai laba relatif cukup baik dibanding UMK yang tidak mengikuti asosiasi.

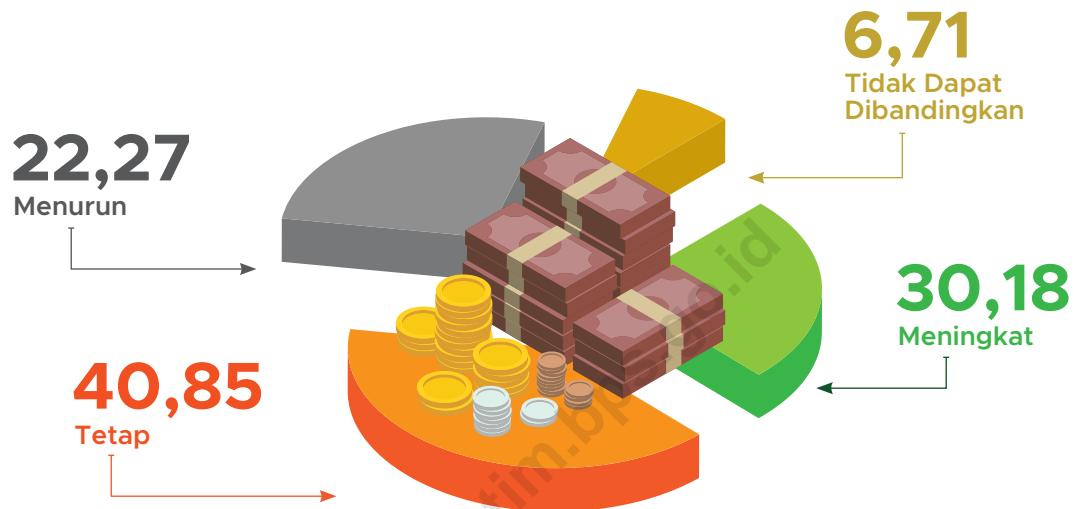
Untuk menjalankan usahanya, permodalan merupakan bagian yang cukup penting. Dari analisis determinan regresi ini, UMK yang memperoleh kredit juga mempunyai laba yang cukup baik dibanding UMK yang tidak memperoleh kredit. Demikian pula UMK yang mempunyai sertifikasi, hasil produknya memperoleh nama di hati konsumen. Umumnya konsumen akan memilih produk-produk barang yang bersertifikasi dibanding yang tidak ada sertifikasinya, sehingga UMK yang mempunyai sertifikasi mempunyai laba yang cukup baik. Selanjutnya, jika ditunjang dengan pemasaran melalui online/internet, membuka peluang yang besar suatu UMK akan lebih dikenal dan luas pangsa pasarnya, sehingga memungkinkan memperoleh laba yang lebih baik dibanding UMK yang tidak memanfaatkan online atau internet.

Tabel 6.1. Balas Jasa/Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori (Ribu Rupiah), 2017

Kategori	Balas Jasa
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	11.184
C. Industri Pengolahan	7.865
F. Konstruksi	24.266
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12.539
H. Pengangkutan dan Pergudangan	16.539
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	13.018
J. Informasi dan Komunikasi	9.396
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	14.171
L. Real Estat	11.536
M,N. Jasa Perusahaan	10.795
P. Pendidikan	16.473
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	26.397
R,S. Jasa Lainnya	10.567
Total	13.086

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Gambar 6.2.**  
**Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015**



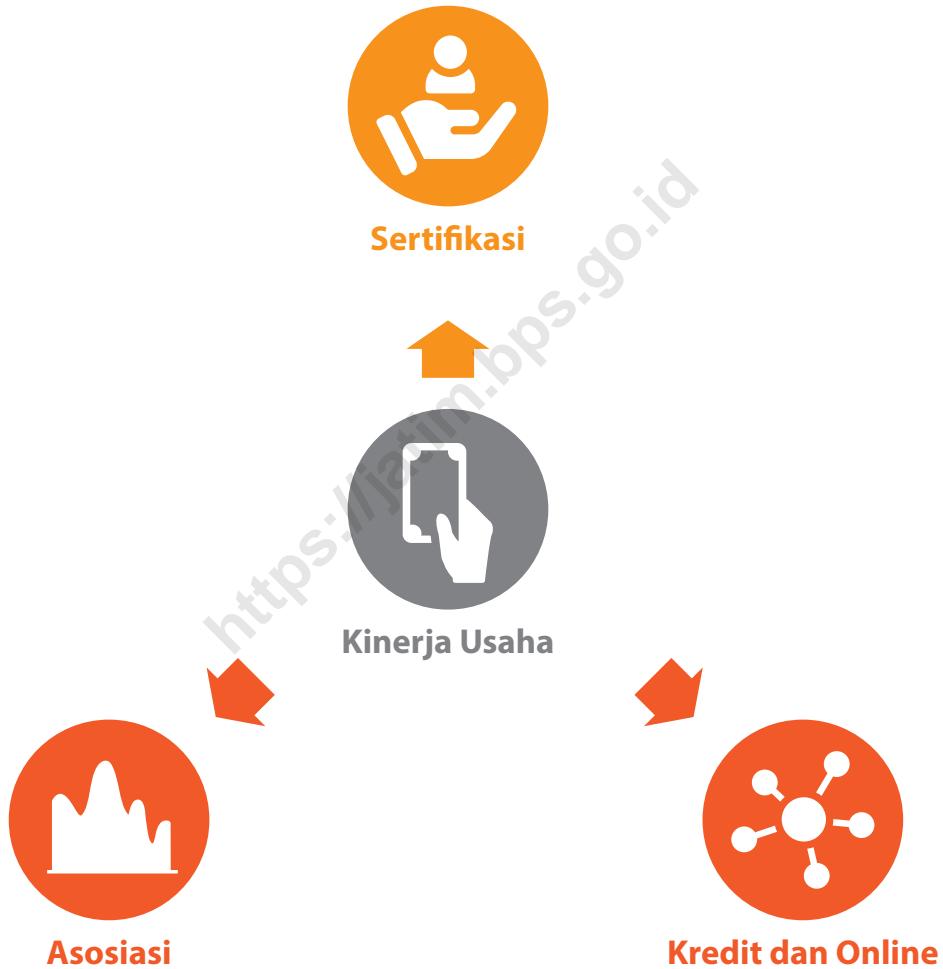
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

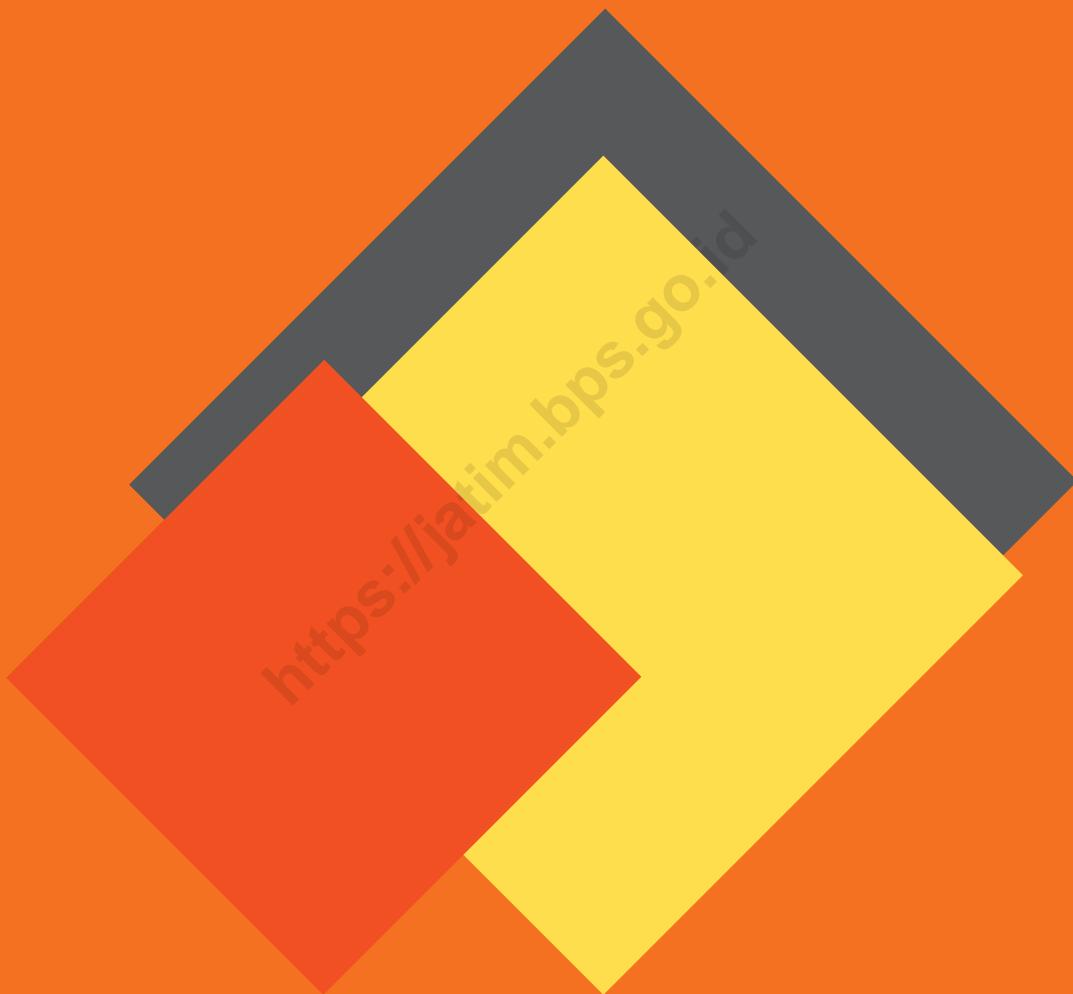
**Gambar 6.3.**  
**Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menurut Lapangan Usaha, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.4.  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha UMK di Jawa Timur  
Berdasarkan Analisis Determinan Regresi Linear Berganda





---

# PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG

---

Bagian

7

<https://jatim.bps.go.id>

**R**PJMN keseluruhan sampel, terdapat pelaku UMK yang mengatakan prospek usaha lebih buruk daripada kondisi sekarang. Yang mengatakan lebih buruk hanya sebanyak 5,03 persen dan sama buruk sebanyak 3,13 persen. Apakah persentase UMK yang pesimistis yang sedikit itu suatu kebetulan? Dari hasil kajian statistik yang advanced, menunjukkan bahwa UMK lebih stabil kondisi perekonomiannya adalah suatu hal yang natural/alami.

Dari keseluruhan sampel, terdapat pelaku UMK yang mengatakan prospek usaha lebih buruk daripada kondisi sekarang. Yang mengatakan lebih buruk hanya sebanyak 5,03 persen dan sama buruk sebanyak 3,13 persen. Apakah persentase UMK yang pesimistis yang sedikit itu suatu kebetulan? Dari hasil kajian statistik yang advanced, menunjukkan bahwa UMK lebih stabil kondisi perekonomiannya adalah suatu hal yang natural/alami.

Pada analisis prospek usaha, digunakan model regresi logistik. Nilai Nagelkerke R Square diperoleh sebesar 0,007 dan Cox & Snell R Square 0,010, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (variabel penentu) dalam menjelaskan variabel dependen (prospek

usaha) adalah hanya sebesar 0,010 atau 1 persen, atau dapat dikatakan terdapat  $100 - 1 = 99$  persen faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Seluruh UMK dalam Classification Table yang mengaku prospek usahanya tidak bagus, oleh model diprediksi mempunyai peluang yang bagus.

Pengusaha menunjukkan bahwa persyaratan khusus atau faktor penentu agar UMK mempunyai prospek usaha yang baik, tidak terlihat jelas. Apapun bentuk dan kondisi UMK, model logistik memprediksi peluang prospek usaha yang baik untuk semua usaha.

Uji determinan regresi logistik tersebut secara tidak langsung, menguatkan bahwa UMK merupakan usaha yang mempunyai pangsa pasar yang cukup luas. Apapun kondisinya, prospek usaha suatu UMK berpeluang besar selalu untung. Kenyataan ini memberikan alasan mengapa UMK lebih mempunyai daya tahan terhadap krisis. Di kala terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1998 lalu, banyak usaha menengah dan besar berguguran kecuali UMK.

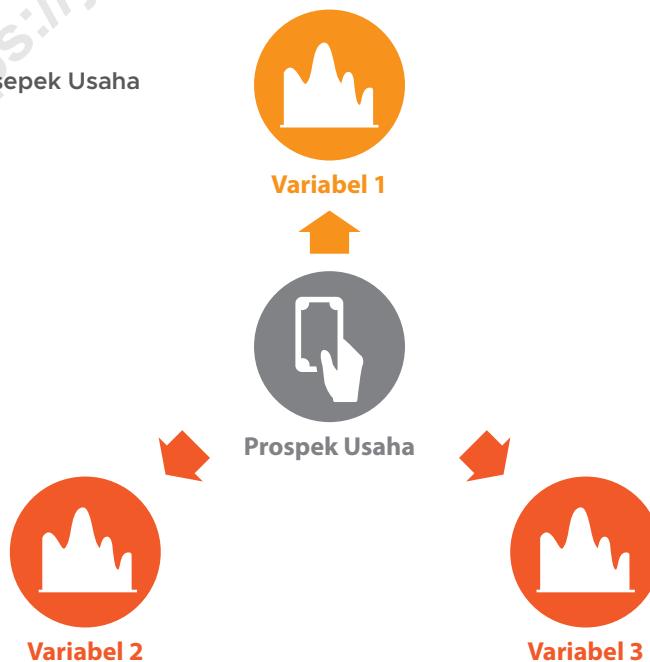
**PROSPEK  
UMK DI MASA  
MENDATANG**

Gambar 7.1.  
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.  
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prosepek Usaha







# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bps@bps.go.id](mailto:bps@bps.go.id)

ISBN 978-602-6756-94-7



9

786026

756947